

## PERAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) DALAM MENGHADAPI ISU POLITIK IDENTITAS PADA PEMILU 2024 DI JAKARTA SELATAN

Muturizal Sah Fenta Hashfi<sup>1</sup>, Lusi Andriyani<sup>2</sup>  
Universitas Muhammadiyah JakartaAlamat: No Jl. Poncol Indah VII No.70, Cireundeu, Kec. Ciputat Tim., Kota  
Tangerang Selatan, Banten 15419Korespondensi penulis: [fentahashfi@gmail.com](mailto:fentahashfi@gmail.com)

**Abstract.** *The 2024 General Election presents a major challenge for Indonesia's democracy, particularly due to the rise of identity politics that has the potential to divide society. Identity politics often triggers conflict and tension between groups. Therefore, it is important for society to increase awareness of the need to reject divisive identity politics and to uphold tolerance and social harmony. In this context, the Forum for Religious Harmony (FKUB) plays a crucial role as a platform for fostering interfaith relations, especially in South Jakarta. This study uses a qualitative method to examine FKUB's role in addressing identity politics during the 2024 election. The findings reveal that FKUB has effectively helped prevent conflicts through open dialogues between groups, assistance in the establishment of houses of worship, and the creation of election posts that serve as information and mediation centers for the community. FKUB has also initiated the 'Kampung Kerukunan' (Harmony Village) program to strengthen social integration. Moving forward, FKUB's role needs to be enhanced by providing training for its members, strengthening dialogue programs, and conducting regular evaluations to ensure the effectiveness of initiatives such as the Harmony Village.*

**Keywords:** *Identity Politics, FKUB, Harmony, Politics, Election*

**Abstrak.** Pemilu 2024 menjadi tantangan besar bagi demokrasi Indonesia, terutama karena munculnya politik identitas yang bisa memecah belah masyarakat. Politik identitas sering memicu konflik dan ketegangan antar kelompok. Untuk itu, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menolak politik identitas yang memecah belah, serta menjaga toleransi dan kerukunan. Dalam hal ini, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) berperan penting sebagai wadah untuk mempererat hubungan antarumat beragama, khususnya di Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk melihat peran FKUB dalam menghadapi politik identitas selama Pemilu 2024. Hasilnya, FKUB berhasil membantu mencegah konflik melalui dialog terbuka antar kelompok, pendampingan pembangunan rumah ibadah, serta pembentukan posko pemilu sebagai pusat informasi dan mediasi masyarakat. FKUB juga menginisiasi Kampung Kerukunan untuk memperkuat integrasi sosial. Ke depan, peran FKUB perlu diperkuat dengan pelatihan anggota, peningkatan program dialog, serta evaluasi rutin untuk memastikan program seperti Kampung Kerukunan berjalan efektif.

**Kata kunci:** Politik Identitas, FKUB, Keukunan, Politik, Pemilu

**Article history**

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagiarism checker no 332

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## LATAR BELAKANG

Pemilu 2024 menjadi titik krusial dalam perjalanan demokrasi Indonesia, khususnya di Jakarta Selatan yang memiliki keragaman etnis dan agama yang tinggi. Keberagaman ini menciptakan dinamika sosial yang kompleks, di mana proses demokrasi tak hanya sebatas pemilihan pemimpin, melainkan juga menjadi ajang pertarungan identitas kelompok. Politik identitas yang mulai menguat sejak Pemilu 2019 menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya perpecahan sosial dan potensi konflik horizontal. Jakarta Selatan menjadi cerminan nyata dari tantangan demokrasi di tengah masyarakat plural, terutama ketika identitas agama dan budaya dimobilisasi untuk kepentingan electoral (Muhtar Haboddin, 2012).

Dalam kondisi ini, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) memegang peran penting sebagai penyeimbang dan penjaga harmoni sosial. Sebagai lembaga yang mengedepankan dialog lintas iman dan kerja sama antar kelompok masyarakat, FKUB berperan sebagai mediator dalam mencegah dan meredam gesekan yang dipicu oleh politisasi identitas. Penelitian ini berfokus pada bagaimana FKUB menjalankan tugasnya dalam menghadapi isu politik identitas selama masa Pemilu 2024 di Jakarta Selatan (Nego, 2020). Rumusan masalah yang dikaji adalah efektivitas dan strategi peran FKUB dalam menjaga kerukunan umat beragama serta mencegah konflik yang timbul dari pengaruh politik identitas (Badan Pusat Statistik Jakarta Selatan, 2021).

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, penelitian ini mengkaji bagaimana FKUB berinteraksi dengan berbagai kelompok masyarakat serta bagaimana strategi komunikasi mereka diterapkan di lapangan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi penguatan peran FKUB dan lembaga sejenis dalam menghadapi tantangan politik identitas, serta menjadi rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam menciptakan pemilu yang damai, inklusif, dan mencerminkan semangat persatuan bangsa di Jakarta Selatan dan Indonesia secara umum.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang berlokasi di kantor Walikota Jakarta Selatan, tepatnya di Jl. Prapanca Raya No.9, Blok A Lantai 6, Kebayoran Baru. Kegiatan penelitian berlangsung selama delapan bulan, dari Desember 2023 hingga Juli 2024, dengan melibatkan pengurus pusat FKUB sebagai fokus utama studi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji peran serta kontribusi FKUB dalam menghadapi tantangan politik identitas yang muncul selama Pemilu 2024 di wilayah Jakarta Selatan.

Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Observasi dilakukan secara langsung terhadap kegiatan FKUB, sementara dokumentasi berupa arsip dan media relevan digunakan untuk memperkuat data (Rachmat Kriyantono, 2006). Selain itu, wawancara dilakukan dengan pengurus aktif dan perwakilan dari enam agama yang tergabung dalam FKUB (Hamidi, 2010). Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian data secara naratif, dan penarikan kesimpulan dengan verifikasi menggunakan teknik triangulasi, agar data yang diperoleh valid dan kredibel (Sugiyono, 2015). Pendekatan ini diharapkan memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai peran strategis FKUB dalam menjaga kerukunan dan mencegah konflik akibat politik identitas selama masa Pemilu 2024.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Konteks Jakarta Selatan

Jakarta Selatan merupakan salah satu kota administrasi di wilayah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta yang terletak di bagian selatan, berbatasan langsung dengan Jakarta Barat dan Jakarta Pusat di utara, Jakarta Timur di timur, serta Kota Tangerang dan Tangerang Selatan di

selatan. Kota ini dikenal sebagai kawasan paling kaya dibandingkan wilayah administrasi lainnya di DKI Jakarta, dengan dominasi permukiman kelas menengah ke atas serta menjadi pusat kegiatan bisnis utama. Dengan jumlah penduduk sekitar 2.057.080 jiwa dan tingkat kepadatan mencapai 14.561,34 jiwa per km<sup>2</sup>, Jakarta Selatan memiliki luas wilayah sebesar 154,3 km<sup>2</sup> dan terbagi menjadi 10 kecamatan, yaitu Cilandak, Jagakarsa, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Mampang Prapatan, Pancoran, Pasar Minggu, Pesanggrahan, Setiabudi, dan Tebet. Kota ini juga terdiri atas 65 kelurahan yang tersebar di seluruh kecamatan tersebut. Dalam konteks penelitian ini, fokus diarahkan pada salah satu wilayah di Jakarta Selatan yang memiliki dinamika sosial dan keberagaman tinggi, menjadikannya lokasi strategis untuk menelaah isu-isu sosial seperti politik identitas, terutama menjelang dan selama pelaksanaan Pemilu 2024 (Firdaus, 2014).

## Jenis Kelamin

Menurut Badan Pusat Statistik, berikut ini adalah profil Jakarta Selatan berdasarkan jenis kelaminnya:

**Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Kriteria	Jumlah
1	Jumlah laki-laki	1.122.780
2	Jumlah Perempuan	1.112.826
	<b>Total</b>	<b>2.235.606</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2023

## Bidang Keagamaan

**Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Tahun 2022**

No	Agama	Jumlah Penduduk
1	Islam	2.187.066
2	Kristen	121.080
3	Katolik	60.168
4	Hindu	3.831
5	Buddha	11.597
6	Kepercayaan	101
7	Aliran Kepercayaan	65

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

**Tabel 3. Jumlah Sarana Tempat Ibadah Jakarta Selatan**

Masjid	Mushola	Geireja Ptoiteistan	Geireja Khatoilik	Pura	Vihara	Kleinteing
848	679	182	6	5	7	1

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

## Mata Pencaharian Masyarakat Jakarta Selatan

**Tabel 4. Mata Pencaharian Masyarakat Jakarta Selatan**

No	Mata Pencaharain	Jumlah Penduduk
1	Peirtanian, Keihutan, dan Peirikanan	239010,60
2	Peirtambangan dan Peinggalian	0,00
3	Industri Peingoilahan	6475474,41
4	Peingadaan Listrik dan Gas	435614,88
5	Peingadaan Air, Peingeiloilan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	137302,41
6	Koinstruksi	49113660,64

7	Peirdagangan Besar dan Eiceiran; Reiparasi Moibil dan Seipeida Moitoir	68504255,45
8	Transpoirtasi dan Peirgudangan	11353357,84
9	Peinyeidiaan Akoimoidasi dan Makan Minum	19964743,95
10	Infoirmasi dan Koimunikasi	87716329,09
11	Jasa Keiuangan dan Asuransi	64601569,53
12	Reial Eistatei	35421635,70
13	Jasa Peirusahaan	53139823,20
14	Administrasi Peimeirintahan, Peirtahanan dan Jaminan Soisial Wajib	20433088,70
15	Jasa Peindidikan	17193487,02
16	Jasa Keiseihatan dan Keigiatan Soisial	11973745,35
17	Jasa lainnya	29103225,31
18	PDRB	475806324,07

Sumber : Badan Pusat Statistik Proivinsi Jakarta Seilatan,(2023).

## Bidang Pendidikan

Tabel 5. Jumlah Data Sarana Peindidikan di Jakarta Seilatan tahun 2022

Pendidikan	SaranaPendidikan		Jumlah
	SD	Negri Swasta	
SD	279	181	136
SMP	66	158	224
SMA	29	75	104
SMK	18	107	125
Univeirsitas	2	85	87

Sumber : Badan Pusat Statistik Proivinsi DKI Jakarta

Berdasarkan data yang ditampilkan, Jakarta Selatan dikenal sebagai wilayah dengan tingkat keberagaman sosial dan ekonomi yang tinggi, ditandai oleh kemajemukan etnis, agama, serta dinamika urban yang pesat. Keberadaan pusat bisnis, perkantoran, dan pemukiman elit menjadikan wilayah ini sebagai magnet bagi berbagai kelompok sosial, mulai dari ekspatriat hingga migran domestik. Secara politik, Jakarta Selatan memiliki karakter pemilih yang cenderung terinformasi dan aktif, tercermin dari tingginya partisipasi dalam pemilu. Namun, keragaman ini juga membawa tantangan, terutama dalam menjaga harmoni di tengah perbedaan pandangan dan kepentingan. Politik identitas kerap muncul dalam berbagai momentum politik, seperti pemilihan kepala daerah, di mana pertimbangan etnis dan agama sering kali menjadi isu utama. Selain itu, rencana pembangunan tempat ibadah atau kebijakan publik tertentu sering memicu perdebatan bernuansa identitas. Peran media sosial memperkuat dinamika ini, menjadi ruang mobilisasi dan penyebaran informasi—baik yang mencerahkan maupun yang memecah belah. Dalam konteks masyarakat majemuk seperti Indonesia, politik identitas menjadi isu yang sensitif karena dapat memicu konflik dan polarisasi jika tidak dikelola secara bijak.

## Analisis Dampak Poilitik Ideintitas

Politik identitas memiliki dampak besar terhadap interaksi sosial dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Dalam konteks keberagaman etnis, agama, dan budaya, identitas sering kali menjadi dasar dalam membentuk relasi antarkelompok. Meski dapat memperkuat ikatan dalam kelompok tertentu, politik identitas juga rentan menimbulkan eksklusivitas sosial dan konflik horizontal jika tidak dikelola secara inklusif. Ketika persepsi terhadap kelompok

lain dibentuk berdasarkan stereotip dan prasangka, ruang toleransi dan keberagaman menjadi sempit. Hal ini menjadikan pengelolaan perbedaan identitas sebagai tantangan utama dalam membangun masyarakat yang harmonis (Habibi, 2017).

Dalam bidang politik dan kebijakan publik, politik identitas sering dimanfaatkan sebagai strategi kampanye oleh partai atau calon tertentu untuk memperoleh dukungan dari kelompok berbasis agama atau etnis. Strategi ini tidak hanya memecah belah masyarakat, tetapi juga menghasilkan kebijakan yang bias dan kurang adil bagi kelompok lain. Polarisasi berbasis SARA menjadi lebih mengkhawatirkan ketika diperkuat oleh penyebaran informasi yang menyesatkan melalui media sosial. Platform digital yang seharusnya menjadi ruang diskusi justru kerap menjadi ajang penyebaran ujaran kebencian dan hoaks, yang memperburuk perpecahan di masyarakat urban seperti Jakarta Selatan. Literasi digital yang rendah dan minimnya dialog antaridentitas mempercepat kerentanan ini (K. R. Kurniawan, 2018).

Dalam menghadapi dinamika tersebut, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jakarta Selatan tampil sebagai aktor strategis yang menjaga kerukunan dan kohesi sosial. FKUB menjalankan perannya melalui berbagai program seperti forum dialog, penyuluhan lintas agama, dan mediasi konflik yang melibatkan tokoh-tokoh agama dari berbagai latar belakang. Hasil wawancara dengan para tokoh FKUB seperti Ustad Solihin dan Kiai Halim menegaskan bahwa pendekatan berbasis pemahaman dan penghormatan terhadap keyakinan masing-masing menjadi kunci utama dalam meredam gejolak politik identitas. Dalam konteks Pemilu 2024, FKUB juga aktif mengingatkan masyarakat agar memilih pemimpin berdasarkan integritas, bukan semata-mata karena kesamaan agama atau etnis (Mahpudin, 2021).

Keberadaan FKUB tidak hanya simbolik, tetapi juga operasional dan responsif terhadap kondisi masyarakat plural yang rawan konflik identitas. Melalui kerja sama dengan lembaga seperti Kesbangpol, FKUB turut mengawasi jalannya proses demokrasi agar tetap damai dan inklusif. Nilai-nilai kewarganegaraan, solidaritas, dan nasionalisme yang diperkuat melalui dialog lintas iman menjadi landasan kuat bagi FKUB dalam menjaga keutuhan sosial. Dengan berbagai upaya tersebut, FKUB Jakarta Selatan menjadi contoh nyata bahwa kerukunan bukan hanya cita-cita, tetapi sesuatu yang bisa diwujudkan melalui kolaborasi aktif dan pendekatan yang berkeadaban (Mentari & Alunaza, 2022).

## **Strategi Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Menghadapi Isu Politik Identitas**

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) memiliki peran strategis dalam menjaga dan memperkuat kerukunan antarumat beragama, terutama di tengah maraknya politik identitas yang kerap menjadi pemicu ketegangan sosial. Untuk menghadapi tantangan ini, FKUB menerapkan berbagai strategi konkret seperti pelaksanaan dialog lintas agama, pendampingan izin rumah ibadah, pembentukan posko bersama pemilu, hingga pengembangan program Kampung Kerukunan. Seluruh inisiatif ini bertujuan membangun pemahaman, toleransi, serta kerja sama yang harmonis antar kelompok agama. Dengan mengedepankan dialog sebagai pendekatan utama, FKUB menciptakan ruang terbuka bagi semua pihak untuk saling mendengar dan memahami perbedaan, sehingga mampu mencegah konflik sejak dini dan menjadikan keberagaman sebagai kekuatan pemersatu, bukan alat perpecahan.



**Gambar 1. Kegiatan Silaturahmi Peimuka Agama**



**Gambar 2. Dialog Antar Beiragama**



**Gambar 3. Diskusi Onlinei Keiragaman Meilalui Soisial Meidia**

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jakarta Selatan secara aktif menjalankan program dialog lintas agama sebagai strategi utama dalam mengurangi dampak politik identitas menjelang Pemilu 2024. Program ini tidak hanya menysasar tokoh agama, tetapi juga melibatkan kelompok muda seperti mahasiswa dan pelajar, yang dianggap lebih terbuka dalam menerima nilai-nilai toleransi dan kerukunan. Hasil wawancara dengan Kiai Halim dan Ustad Solihin menunjukkan bahwa dialog yang difasilitasi FKUB bersama lembaga seperti Kesbangpol, FPK, dan LMK telah berhasil memperluas jangkauan partisipasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keutuhan NKRI. Kegiatan seperti silaturahmi antar pemuka agama, diskusi daring via Zoom, dan forum tatap muka rutin menjadi bukti bahwa FKUB tidak hanya bekerja reaktif dalam meredam konflik, tetapi juga proaktif dalam membangun pemahaman lintas identitas secara berkelanjutan.

Selain menjalankan program dialog, FKUB juga berperan penting dalam proses pendampingan izin pendirian rumah ibadah sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sosial. Meskipun isu ini tidak selalu muncul dalam konteks pemilu, sering kali rumah ibadah menjadi objek ketegangan yang dapat dimanfaatkan dalam politik identitas. Oleh karena itu, FKUB turun langsung ke lapangan untuk mendampingi proses perizinan, memberikan edukasi kepada masyarakat, dan menjadi mediator antara warga serta pemuka agama. Ustad Dinoel dan Panitua Jhonery menekankan bahwa meskipun tantangan masih banyak, termasuk ketika FKUB sempat demisioner, pendekatan berbasis dialog dan penyelesaian persuasif tetap diupayakan. Dengan strategi ini, FKUB membuktikan diri sebagai pilar penting dalam menjaga kerukunan, tidak hanya secara simbolik, tetapi juga secara konkret dan aplikatif di tengah dinamika sosial yang kompleks.



**Gambar 4. Pendampingan Izin Rumah Ibadah**

Foto tersebut merepresentasikan peran aktif FKUB Jakarta Selatan dalam mendampingi proses pendirian rumah ibadah sesuai dengan regulasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan No. 9 Tahun 2006, dengan memastikan kelengkapan administratif dan pemenuhan syarat sosial-hukum secara adil dan inklusif. Pendampingan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga bertujuan menjaga kerukunan antarumat beragama di tengah potensi gesekan sosial, terutama saat menjelang Pemilu 2024 ketika isu politik identitas sering kali memanfaatkan simbol keagamaan sebagai alat polarisasi. Dalam konteks tersebut, FKUB juga membentuk Posko Bersama Pemilu sebagai pusat koordinasi lintas lembaga untuk mencegah konflik, menjaga harmoni, dan merespons cepat potensi ketegangan di lapangan. Posko ini melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, tokoh masyarakat, FKDM, dan FPK, serta menjadi langkah konkret FKUB dalam mengawal demokrasi yang damai dan toleran, memastikan bahwa aktivitas keagamaan tetap berlangsung aman dan tidak dijadikan alat politisasi yang memecah belah masyarakat.



**Gambar 5. Posko Pemilu Jakarta Selatan**



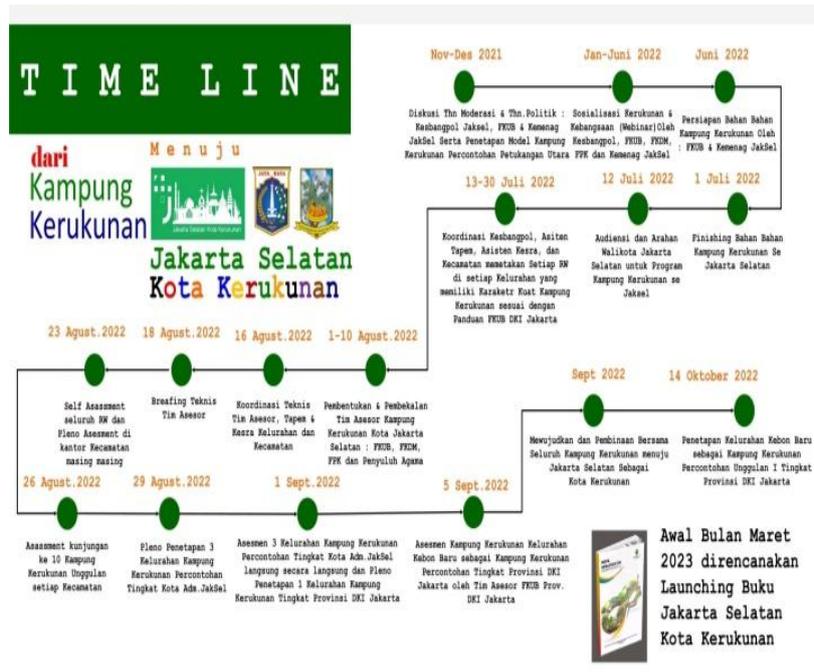
**Gambar 5. Diskusi dan Penjagaan Posko Pemilu**

Berdasarkan hasil wawancara dan temuan lapangan, salah satu strategi efektif yang diterapkan untuk meminimalisir konflik akibat isu politik identitas di Jakarta Selatan adalah pembentukan Posko Bersama Pemilu. Posko ini melibatkan berbagai unsur seperti Kesbangpol, TNI, Polri, FKUB, serta perwakilan tokoh agama dan komunitas masyarakat sebagai pusat koordinasi lintas sektor. Peran posko tidak hanya sebagai tempat pemantauan, tetapi juga sebagai wadah edukasi dan pencegahan melalui seminar, workshop, dan kampanye publik yang menyasar kesadaran masyarakat terhadap bahaya politik identitas. Selain itu, posko melakukan pemantauan secara real-time dan analisis potensi konflik sejak dini, memastikan penyebaran informasi tidak menjadi alat provokasi. Di sisi lain, FKUB turut menginisiasi program "Kampung Kerukunan" yang memperkuat solidaritas sosial melalui dialog lintas iman, kolaborasi antarwarga, dan apresiasi bagi wilayah yang berhasil menjaga harmoni. Program ini telah sukses dilaksanakan di wilayah seperti Tebet dan Petukangan Utara, serta menjadikan Kelurahan Asam Baris sebagai Kampung Kerukunan Terbaik, menunjukkan keberhasilan nyata FKUB dalam membangun ketahanan sosial menghadapi polarisasi identitas menjelang Pemilu.



**Gambar 6. Peresmian Kampung Kerukunan Kec. Tebet**

Legal Standing Kampung Kerukunan adalah pertama, PBM Tahun 2006, kedua, Pergub No.83 Tahun 2012 ketiga, Program Kementerian Agama RI : Desa Sadar Kerukunan dan yang keempat adalah, Buku Panduan Kampung Kerukunan FKUB Provinsi DKI Jakarta. Kampung kerukunan diharapkan menjadikan Kota Jakarta Selatan Kota Kerukunan dengan terbentuknya Kampung-Kampung Kerukunan tingkat RW di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Ruang-lingkup program Kampung Kerukunan mencakup : (1) Mendorong terbangunnya Kampung Kerukunan sesuai dengannilai-nilai kerukunan. (2) Mendeklarasikan wilayah-wilayah kelurahan yang sudahmemiliki nilai-nilai kerukunan sebagaimana terdapat pada Alat Ukur Kampung Kerukunan. (3) Meningkatkan implementasi nilai-nilai dan semangat kerukunan di kelurahan-kelurahan, khususnya di Kota Admnistrasi Jakarta Selatan, melalui penilaian kerukunan, pemberian penghargaan, aksi kerukunan, pendirian Kafe Kerukunan, dan lain sebagainya.



**Gambar 7. Timeline Pelaksanaan Program Kampung Kerukunan**

Program "Dari Kampung Kerukunan Menuju Jakarta Selatan Kota Kerukunan" merupakan inisiatif kolaboratif antara FKUB, pemerintah, dan masyarakat lokal yang bertujuan memperkuat kerukunan antarumat beragama melalui tahapan perencanaan, sosialisasi, koordinasi, implementasi, hingga evaluasi. Program ini tidak hanya meningkatkan toleransi, tetapi juga menjadi contoh nyata praktik kerukunan di masyarakat, dengan sepuluh RW terpilih sebagai Kampung Kerukunan tahap awal, termasuk RW 003 Kebon Baru sebagai percontohan unggulan. Keberhasilan program ini diakui oleh berbagai tokoh, seperti Ustad Rahadi, Kiai Halim, dan Ustad Dinoel, yang menilai isu politik identitas di Jakarta Selatan telah terkendali dan stabilitas sosial tetap terjaga berkat dialog intensif serta koordinasi dengan berbagai pihak. Program ini menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat di tingkat RW dan RT dengan pendekatan partisipatif, di mana warga dilibatkan aktif dalam setiap tahapan kegiatan, termasuk edukasi, dialog antaragama, pembentukan posko pemilu, dan kontes kampung kerukunan, sehingga FKUB terus berupaya menjaga keharmonisan dan mengantisipasi potensi konflik politik identitas, dengan evaluasi berkala untuk memastikan keberlanjutan dan dampaknya terhadap pembangunan sosial dan ekonomi di Jakarta Selatan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jakarta Selatan memiliki peran strategis dalam menghadapi isu politik identitas pada Pemilu 2024, meskipun secara kelembagaan tidak terlibat langsung dalam politik praktis. FKUB berfokus pada upaya menjaga stabilitas sosial di tengah meningkatnya politisasi perbedaan suku, agama, dan ras yang berpotensi memicu konflik. Melalui berbagai program, FKUB membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya toleransi dan kerukunan. Strategi yang dilakukan meliputi dialog terbuka antar kelompok masyarakat, pendampingan pendirian rumah ibadah, pendirian posko pemilu sebagai pusat mediasi, serta pengembangan Kampung Kerukunan sebagai contoh lingkungan harmonis. Seluruh langkah ini menunjukkan peran FKUB sebagai fasilitator dan aktor sosial yang berupaya mengurangi ketegangan politik identitas secara konstruktif. Dengan pendekatan partisipatif dan berbasis komunitas, FKUB berkontribusi menjaga suasana damai dan memperkuat kohesi sosial di Jakarta Selatan selama proses pemilu berlangsung.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian artikel ini, baik melalui dukungan dana, fasilitas, maupun masukan ilmiah. Artikel ini merupakan bagian dari hasil penelitian yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Haboddin, M. (2012). Menguatnya politik identitas di ranah lokal. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 3(1), 16-28.
- Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Selatan. (2022). Kota Jakarta Selatan dalam Angka 2022. <https://jakselkota.bps.go.id/id/publication>
- Nego, O. (2020). Teologi Multikultural sebagai Respon terhadap Meningkatnya Eskalasi Politik Identitas di Indonesia. *PASCA: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen*, 16(2). <https://doi.org/10.46494/psc.v16i2.109>
- Kriyantono, Rachmat. *Teknik Praktis Riset Komunikasi Jakarta: Kencana Prenada Media Group*, 2006.
- Hamidi. (2010). *Metode penelitian kualitatif: Pendekatan praktis penulisan proposal dan laporan penelitian*. UMM Press.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*/ Sugiyono. Bandung: Alfabeta.
- Firdaus, M. A. (2014). Eksistensi FKUB dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 29(1), 62-72.
- Habibi, M. (2017). Analisis Politik Identitas di Indonesia. Universitas Mulawarman, Samarinda, 1(March).
- Kurniawan, K. R. (2018). DINAMIKA ARSITEKTUR INDONESIA DAN REPRESENTASI 'POLITIK IDENTITAS' PASCA REFORMASI. *NALARs*, 17(1). <https://doi.org/10.24853/nalars.17.1.65-78>
- Mahpudin, M. (2021). Kebangkitan Politik Identitas dalam Proses Demokratisasi di Indonesia Pasca Orde Baru. *Jurnal Sosial Politik*, 7(2). <https://doi.org/10.22219/sospol.v7i2.10781>
- Mentari, M., & Alunaza, H. (2022). Multikulturalisme dan Politik Identitas di Indonesia. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(1). <https://doi.org/10.35931/aq.v16i1.810>